Negara, Agama dan Warga Negara

Khoirul Huda¹, Amanda Putri Rizkita², Salsabilla Khairus Syifa³
^{1,2,3} Ilmu Komputer, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: khoirulhuda@uinsu.ac.id¹, amandaputririzkita@gmail.com²,
salsabillakhairuss@gmail.com³

Abstrak

Tulisan ini membahas secara komprehensif hubungan antara negara, agama, dan warga negara dalam perspektif politik Islam, dengan menyoroti dinamika historis dan konseptual yang memengaruhi peran serta posisi ketiganya. Dalam tradisi Islam, negara tidak hanya dipahami sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai lembaga moral dan spiritual yang bertugas menegakkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial. Melalui sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, Islam membentuk fondasi politik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip religius dalam tata kelola negara. Tulisan ini juga mengeksplorasi model-model hubungan antara agama dan negara di berbagai konteks dunia Islam, mulai dari negara teokratis hingga sekuler, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dipandang sebagai sintesis antara nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, yang memungkinkan umat Islam berperan aktif dalam kehidupan politik tanpa mengabaikan prinsip kebhinekaan. Dengan menyoroti konsep negara-bangsa, *maqashid al-syari'ah*, dan *fiqh kewarganegaraan*, tulisan ini menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk membangun sistem politik yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Islam memberikan landasan etis dan spiritual bagi warga negara untuk berperan sebagai agen moral dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Kata Kunci: *Negara, Teokratis, Sekuler, Keadilan Sosial dan Fondasi Politik*

Abstract

This paper comprehensively examines the relationship between the state, religion, and citizenship from the perspective of Islamic political thought, highlighting the historical and conceptual dynamics that influence their respective roles and positions. In Islamic tradition, the state is not merely viewed as a political entity but also as a moral and spiritual institution tasked with upholding religious values and social justice. Drawing on primary sources such as the Qur'an and the Sunnah, Islam provides a political foundation that integrates religious principles into the governance of the state. The paper also explores various models of the religion-state relationship across the Islamic world—from theocratic to secular states—and their implications for the rights and responsibilities of citizens. In the Indonesian context, Pancasila as the state ideology is regarded as a synthesis between religious and national values, allowing Muslims to actively participate in political life without neglecting the principle of pluralism. By discussing the concept of the nation-state, *maqāṣid al-sharī'ah*, and Islamic jurisprudence on citizenship (*fiqh al-muwāṭānah*), this paper emphasizes the importance of collective awareness in building a just, inclusive political system that respects human rights. Islam offers an ethical and spiritual foundation for citizens to act as moral agents in balancing religious aspirations with the principles of modern democracy.

Keywords: *State, Theocratic, Secular, Social Justice, Political Foundation.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara negara, agama, dan warga negara merupakan isu fundamental dalam kajian politik, khususnya dalam konteks negara yang memiliki basis religius seperti dalam politik Islam. Dalam pandangan Islam, negara tidak semata-mata merupakan entitas politik yang bersifat sekuler, melainkan memiliki fungsi moral dan spiritual dalam membimbing masyarakat menuju

kemaslahatan dunia dan akhirat. Negara bukan hanya penjamin keamanan dan keteraturan, tetapi juga pelindung nilai-nilai agama dan keadilan sosial.

Dalam kerangka negara Islam klasik, agama menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat. Warga negara dalam konteks ini tidak hanya dituntut untuk patuh kepada negara, tetapi juga kepada prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar berdirinya negara tersebut.

Namun, dalam praktiknya, hubungan antara negara dan agama tidak selalu linear dan stabil. Di berbagai belahan dunia Islam, terdapat spektrum relasi antara keduanya: mulai dari negara yang sangat religius (teokratis), negara yang memadukan hukum agama dan sipil (negara hybrid), hingga negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan kenegaraan. Masing-masing model ini berdampak pada posisi dan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Warga negara dalam sistem Islam ideal memiliki kedudukan yang mulia. Mereka tidak sekadar objek kekuasaan, tetapi juga subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam mewujudkan keadilan sosial. Prinsip musyawarah, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan partisipasi aktif menjadi ciri penting dalam konsep kewarganegaraan Islam. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan beragama, keadilan hukum, dan kesejahteraan ekonomi.

Sementara itu, dalam negara sekuler modern, warga negara dipandang sebagai individu yang otonom, di mana agama dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh memengaruhi kebijakan publik. Konsep kewarganegaraan dibangun di atas prinsip kesetaraan hukum dan hak sipil, tanpa membedakan latar belakang agama atau keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan inklusivitas dalam masyarakat pluralistik.

Dalam konteks negara demokrasi dengan mayoritas Muslim, tantangan yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan antara aspirasi keagamaan masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Ketika agama menjadi sumber nilai dan moral masyarakat, sementara negara dituntut untuk netral terhadap semua agama, maka peran warga negara menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni antara keduanya.

Islam sebenarnya memberikan ruang yang luas untuk pengembangan konsep kewarganegaraan yang adaptif. Nabi Muhammad SAW, dalam Piagam Madinah, telah menunjukkan model negara multikultural yang mengakui keberagaman agama dan menjamin hak-hak semua komunitas dalam satu kesatuan politik. Ini menjadi preseden penting bahwa Islam mengakui eksistensi warga negara yang berbeda agama tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental Islam.

Penting untuk dicatat bahwa relasi antara negara, agama, dan warga negara sangat dipengaruhi oleh konteks historis, politik, dan budaya setempat. Di beberapa negara mayoritas Muslim, agama digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sementara di negara lain, agama ditekan dalam ruang privat demi menjaga netralitas negara. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini penting agar tidak terjadi manipulasi agama untuk kepentingan politik praktis.

Akhirnya, harmoni antara negara, agama, dan warga negara hanya bisa terwujud jika ada kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Islam, sebagai agama yang menekankan nilai-nilai tersebut, dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun sistem kenegaraan yang adil dan inklusif. Warga negara pun dituntut untuk menjadi agen moral yang aktif dalam mengawasi negara dan memastikan nilai-nilai agama dijalankan secara proporsional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Metode yang diterapkan adalah studi pustaka, yang memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah sebagai bahan utama dalam pengumpulan data dan informasi. Studi pustaka ini difokuskan pada analisis dan interpretasi data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti, bukan pada data

numerik. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna dan konteks secara komprehensif untuk memperkuat landasan teoritis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara dan Bangsa

Konsep negara dan bangsa merupakan fondasi utama dalam kajian politik modern, termasuk dalam politik Islam. Secara historis, bentuk negara telah mengalami evolusi panjang, mulai dari komunitas suku, kerajaan, imperium, hingga negara-bangsa modern. Dalam tradisi Barat, konsep negara-bangsa (nation-state) mulai menguat pasca Perdamaian Westphalia (1648) yang menandai lahirnya sistem kedaulatan negara modern. Sementara dalam dunia Islam, bentuk kenegaraan berkembang sejak masa kenabian hingga kekhalifahan dengan orientasi teokratis yang khas.

Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda namun saling terkait. Negara merujuk pada entitas politik yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Sedangkan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan identitas, seperti bahasa, budaya, sejarah, dan aspirasi hidup bersama. Dalam konteks modern, negara-bangsa menjadi bentuk dominan dari organisasi politik, di mana identitas nasional dijadikan dasar persatuan.

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, negara tidak dibangun atas dasar etnis atau ras, melainkan atas dasar agama dan akidah. Persaudaraan Islam (ukhuwwah islamiyyah) menjadi fondasi utama pembentukan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, umat Islam dari berbagai latar belakang bangsa dapat hidup dalam satu naungan politik yang sama, sebagaimana terjadi dalam Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah.

Namun dalam perkembangan politik kontemporer, dunia Islam tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa kini umat Islam tersebar dalam berbagai negara-bangsa dengan batas wilayah dan pemerintahan masing-masing. Tantangan yang muncul adalah bagaimana tetap menjaga semangat persatuan umat (ukhuwah) tanpa mengabaikan loyalitas kewarganegaraan kepada negara masing-masing. Dalam hal ini, muncul pemikiran baru yang mencoba merekonsiliasi antara Islam sebagai agama universal dengan negara-bangsa sebagai kenyataan politik modern.

Berbagai teori tentang negara telah lahir dari peradaban Barat dan Islam. Dalam filsafat Barat, negara dipandang sebagai kontrak sosial antara individu untuk menjaga ketertiban dan hak-hak dasar mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Sementara dalam tradisi Islam, negara dilihat sebagai sarana untuk menegakkan syariat dan keadilan, serta melayani kepentingan umat. Tokoh seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan pentingnya otoritas politik dalam menjaga agama dan dunia (al-din wa al-dunya).

Tujuan negara dalam Islam bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mewujudkan maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Negara ideal dalam Islam tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dengan demikian, negara Islam bukanlah negara teokratis yang menindas rakyat atas nama agama, melainkan negara yang berfungsi sebagai pelayan umat (khadim al-ummah).

Cita-cita politik Islam adalah tegaknya keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Keadilan menjadi nilai utama dalam sistem politik Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" (QS. An-Nahl: 90). Negara bertanggung jawab menjamin keadilan sosial, hukum yang tidak diskriminatif, serta kebebasan yang bertanggung jawab dalam ruang publik.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, perumusan negara berdasarkan Pancasila dapat dipandang sebagai bentuk sintesis antara nilai-nilai universal Islam dan kebangsaan. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang memberikan ruang bagi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Hal ini mencerminkan cita-cita negara Indonesia sebagai negara yang religius, inklusif, dan berkeadaban.

Oleh karena itu, pendidikan politik Islam penting untuk menanamkan kesadaran tentang arti negara dan bangsa, bukan sebagai dua kutub yang berlawanan, tetapi sebagai dua entitas yang bisa bersinergi demi kemaslahatan umat dan stabilitas sosial. Sejarah dan teori negara memberi

kita pijakan konseptual, sementara tujuan dan cita-cita memberi arah dan makna dalam perjalanan kenegaraan.

Hubungan Agama dan Negara

Hubungan antara agama dan negara merupakan topik yang selalu hangat dalam kajian politik, baik di dunia Barat maupun dalam tradisi Islam. Di satu sisi, agama memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, negara sebagai entitas politik bertugas mengelola kehidupan bersama secara rasional dan administratif. Pertanyaannya adalah: sejauh mana agama boleh dan harus berperan dalam urusan negara?

Dalam sejarah Barat, hubungan agama dan negara mengalami pasang surut. Pada Abad Pertengahan, Gereja memiliki otoritas dominan atas negara, namun sejak era Pencerahan, muncul tuntutan pemisahan antara keduanya yang dikenal dengan istilah sekularisasi. Tokoh seperti John Locke dan Thomas Jefferson menekankan pentingnya pemisahan agama dari negara demi kebebasan individu dan perlindungan hak-hak sipil. Konsep ini kemudian menjadi fondasi bagi negara-negara sekuler modern.

Sebaliknya, dalam sejarah Islam, hubungan agama dan negara tidak pernah benar-benar dipisahkan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, Islam berperan tidak hanya sebagai agama spiritual, tetapi juga sebagai sistem sosial-politik. Nabi bertindak sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara, yang memadukan wahyu dan kebijakan publik dalam satu kepemimpinan. Model ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam setelahnya.

Konsep negara dalam Islam berakar dari prinsip bahwa agama adalah landasan moral dan hukum bagi kehidupan bersama. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama dalam membentuk hukum publik, sistem peradilan, dan kebijakan ekonomi. Namun, bentuk dan struktur negara dalam Islam tetap terbuka bagi ijtihad sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, relasi agama dan negara dalam Islam bersifat fungsional dan dinamis, bukan dogmatis dan kaku.

Di era modern, hubungan agama dan negara di dunia Islam sangat beragam. Ada negara yang menegakkan syariat Islam secara formal (seperti Iran dan Arab Saudi), negara dengan sistem sekuler penuh (seperti Turki pasca-Kemal), dan negara yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi (seperti Indonesia). Model-model ini menunjukkan bahwa tidak ada satu bentuk baku hubungan agama dan negara dalam Islam, tetapi bersifat kontekstual.

Dalam konteks Indonesia, hubungan agama dan negara dibangun atas dasar Pancasila, yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Negara tidak menganut satu agama tertentu, tetapi memberikan tempat yang terhormat bagi agama dalam kehidupan publik. Kebijakan seperti pendidikan agama, hari libur keagamaan, dan pengakuan enam agama resmi menunjukkan adanya sinergi antara negara dan agama tanpa menjadi negara agama.

Pemikir Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman menyarankan agar negara bersifat netral secara institusional, tetapi tetap mengakui pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk etika publik. Negara tidak boleh menjadi alat kelompok agama tertentu, tetapi harus menjamin kebebasan beragama dan menghindari diskriminasi. Dalam pandangan ini, negara ideal adalah negara sipil yang terinspirasi nilai-nilai agama (madaniyyah bi la hiya' kal diniyyah).

Masalah muncul ketika agama dijadikan alat politik kekuasaan. Dalam sejarah Islam maupun di masa kini, manipulasi agama oleh penguasa atau kelompok politik tertentu seringkali memicu konflik, ketidakadilan, dan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kritis bahwa meskipun agama memiliki potensi besar dalam memandu negara, ia juga rentan disalahgunakan jika tidak dikawal oleh nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, hubungan agama dan negara dalam Islam tidak harus berarti dominasi agama atas negara atau sebaliknya. Yang ideal adalah relasi saling menopang: agama memberi arah etis dan moral, sementara negara menjamin ruang bagi agama tanpa menjadi instrumen pemaksaan. Islam mendukung negara yang adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Dalam sistem kenegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek fundamental yang dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 secara eksplisit menjamin berbagai hak dasar warga negara, termasuk hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I UUD 1945.

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Konsep *al-huquq al-insaniyyah* (hak-hak kemanusiaan) merupakan bagian integral dari ajaran Islam, sebagaimana tergambar dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar hidup bersama di negara Madinah. Islam mengakui hak atas keselamatan jiwa, harta, kehormatan, dan kebebasan beragama sebagai hak yang melekat pada setiap manusia.

Namun, hak selalu berdampingan dengan kewajiban. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kewajiban warga negara mencakup loyalitas kepada negara, kepatuhan terhadap hukum, pembelaan terhadap kedaulatan nasional, serta kontribusi aktif dalam pembangunan. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban ini juga ditegaskan dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*" (QS. Al-Ma'idah: 2).

Islam menempatkan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Seorang Muslim tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban ritual kepada Allah, tetapi juga wajib menunaikan tanggung jawab sosial seperti menegakkan keadilan, membantu sesama, menjaga keamanan, dan menghormati otoritas pemerintahan yang sah. Dalam konteks negara, ini berarti ketaatan terhadap aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki kewajiban ganda: sebagai warga negara yang tunduk pada hukum negara, dan sebagai umat Islam yang tunduk kepada ajaran agama. Namun keduanya tidak bertentangan selama negara tidak memaksa umat Islam untuk melanggar ajaran agamanya. Dalam situasi demikian, umat Islam tetap bisa menjalankan agamanya secara utuh sambil menjadi warga negara yang baik.

Pengakuan terhadap keragaman dalam kehidupan bernegara menjadi kunci harmoni dalam masyarakat Indonesia. Umat Islam sebagai mayoritas memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kohesi sosial, menghormati hak-hak minoritas, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Hak dan kewajiban warga negara tidak boleh ditentukan oleh mayoritas agama, suku, atau etnis, tetapi oleh kesamaan status sebagai warga negara Republik Indonesia.

Salah satu hak penting warga negara dalam negara demokrasi adalah hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Islam mendorong partisipasi aktif dalam urusan publik (*al-syura*) dan mendukung prinsip perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, warga negara Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan hak politiknya dengan bijak demi memilih pemimpin yang adil dan amanah.

Pendidikan kewarganegaraan Islam (*fiqh al-muwathin*) menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjadi warga negara bukan sekadar status administratif, melainkan peran aktif dalam menjaga keutuhan negara, menegakkan keadilan, dan memajukan bangsa. Islam tidak menolak konsep kewarganegaraan modern, tetapi justru memberikan dasar etis dan spiritual bagi pembentukan warga negara yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk umat Islam di dalamnya, harus dipahami secara seimbang. Pemenuhan hak tanpa kesadaran akan kewajiban dapat melahirkan masyarakat yang egois, sementara penekanan pada kewajiban tanpa pengakuan hak bisa mengarah pada otoritarianisme. Negara Pancasila memberi ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan peran politik dan sosialnya secara konstruktif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

SIMPULAN

Hubungan antara negara, agama, dan warga negara dalam konteks politik Islam merupakan suatu dinamika yang kompleks namun fundamental. Islam menempatkan negara sebagai entitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam pandangan ini, negara

harus menjalankan peran ganda: sebagai pelindung hak-hak warga negara dan sebagai penjaga nilai-nilai religius yang menjadi fondasi masyarakat.

Meskipun Islam memiliki sejarah panjang dalam memadukan otoritas agama dan negara, realitas politik kontemporer menunjukkan keragaman model hubungan agama dan negara, mulai dari teokratis hingga sekuler. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, memilih jalan tengah dengan membangun sinergi antara nilai-nilai religius dan prinsip demokrasi melalui dasar negara Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem politik modern, selama dijalankan dengan prinsip inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsep negara dan bangsa dalam Islam tidak bertentangan dengan realitas negara-bangsa modern. Sebaliknya, Islam menawarkan prinsip-prinsip universal yang dapat menopang kehidupan berbangsa, seperti persaudaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Pendidikan politik Islam diperlukan untuk membangun kesadaran bahwa loyalitas terhadap negara tidak berarti meninggalkan identitas keagamaan, dan sebaliknya, menjadi Muslim yang baik juga berarti menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Demikian pula, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak asasi dan tanggung jawab sosial. Warga negara, khususnya umat Islam, memiliki peran strategis sebagai agen moral dalam memastikan negara berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Dengan kesadaran ini, tercipta harmoni antara agama, negara, dan warga negara, yang menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, Oxford University Press, 2000.
- Ahmad Ibrahim al-Sharif, *Tarikh al-Khilafah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1990.
- Ali Muhammad al-Sallabi, *Sirah al-Nabawiyyah*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 2003.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, Bandung: Mizan, 2004.
- Bassam Tibi, *Political Islam, World Politics and Europe*, London: Routledge, 2014.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2007.
- John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, New York: Dover Publications, 2002.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- John Rawls, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993.
- Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy*, Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, Kairo: Dar al-Manar, 1969.
- Muhammad Abu Zahrah, *Nazariyyah al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1967.
- Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, University of California Press, 1961.
- Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1941.
- Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1941.
- Noah Feldman, *The Fall and Rise of the Islamic State*, Princeton University Press, 2008.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford University Press, 2009.
- Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, jilid 6.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muwathanah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2009.